



REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
PADA
RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2022**

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.***

Yang kami hormati,

Ketua DPR RI, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPR RI, baik yang hadir secara fisik, maupun yang mengikuti secara daring, serta Para hadirin yang berbahagia.

Mari bersama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, dengan persetujuan DPR RI pada hari ini.

RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021 mencerminkan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR RI, setelah melalui proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

Pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021, telah mengikuti aturan dan proses legislasi DPR. Dalam pembahasan RUU tersebut, kami menerima catatan, masukan dari seluruh fraksi DPR untuk perbaikan dan efektivitas pengelolaan APBN yang akan dipelajari secara seksama dan dilaksanakan sesuai aturan perundangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2021 kembali mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, artinya sejak 2016 Pemerintah berhasil mempertahankan status WTP - meskipun dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang tidak mudah. Kami menyadari bahwa perbaikan akuntabilitas pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui sinergi di internal pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah akan melakukan pendampingan dan asistensi, khususnya untuk Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya masih belum mendapatkan opini WTP, sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPR RI.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, melakukan monitoring dan melaporkan kemajuan penyelesaiannya kepada BPK secara berkala. Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR-RI yang disepakati dalam RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih baik.

Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten dan hati-hati, sehingga APBN terus menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara dan perekonomian secara berkelanjutan.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

APBN Tahun Anggaran 2021 disusun di tengah masa pandemi yang sangat sulit dan penuh ketidakpastian. Banyak yang belum kita pahami mengenai tantangan pandemi Covid-19, namun Pemerintah dan DPR memilih untuk tetap optimis bahwa tahun 2021 Indonesia akan pulih karena memang tanda-tanda pemulihan terlihat sejak triwulan ke-3 tahun 2020 dengan diperolehnya vaksin dan dimulainya program vaksinasi

di awal tahun 2021. Akan tetapi, Pemerintah dan DPR RI juga bersepakat untuk tetap waspada dengan ditunjukkan melalui rancangan kebijakan APBN yang fleksibel agar tetap dapat merespon ketidakpastian yang masih berlangsung.

Munculnya varian Delta yang masif dan mematikan pada akhir Juni hingga Agustus 2021 membuktikan bahwa fleksibilitas dan respon cepat sangat penting. APBN kembali harus bekerja keras, pada saat pembatasan pergerakan manusia secara ketat (PPKM Darurat) diberlakukan beberapa kali. APBN hadir nyata melindungi rakyat dengan vaksin Covid-19 dan program vaksinasi. Indonesia termasuk sedikit negara yang program vaksinasi berjalan sangat cepat dan meluas. APBN memberikan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan siang dan malam. APBN membeli obat dan membayar klaim pasien Covid di seluruh Indonesia.

Untuk melindungi ekonomi keluarga yang paling rentan, APBN menambah dan mempertebal bantalan sosial dan memberikan bantuan bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima, Nelayan, dan Petani, serta memberikan subsidi upah. APBN hadir melindungi dunia usaha melalui berbagai insentif perpajakan dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dengan berbagai kebijakan dan langkah sinergi yang optimal antara Pemerintah dan DPR RI, ekonomi Indonesia tahun 2021 akhirnya dapat tumbuh 3,69 persen. Meskipun masih di bawah target APBN, nilai tersebut bukanlah sebuah capaian yang buruk karena dihasilkan dari sebuah proses di tengah situasi yang sangat berat, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga berbagai negara lain di dunia. Level PDB riil tahun 2021 juga telah berhasil melampaui level pada periode pra-pandemi. Capaian ini patut kita syukuri, mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti: Thailand, Filipina, Malaysia, Mexico, Jerman, Perancis, Italia dan masih banyak negara lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat PDB per kapita Indonesia (dalam nominal) berhasil naik 8,55 persen, dari 57,3 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 62,2 juta rupiah di tahun 2021.

Capaian inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen, menunjukkan masih lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas kepada harga komoditas di dalam negeri. Meskipun demikian, pada paruh kedua tahun

2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang memberikan sinyal perbaikan permintaan, seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung.

Tren pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71 persen per September 2021, di mana pada tahun sebelumnya mencapai 10,19 persen. Sementara itu, menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07 persen per Agustus 2020 menjadi 6,49 persen per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Penurunan kemiskinan dan rasio gini selalu menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan APBN. Pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada melebarnya ketimpangan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio gini pada September 2020 dan Maret 2021. Namun, kerja keras kita semua dengan kebijakan yang cepat dan tepat, akhirnya pada September 2021, ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai membaik yang ditunjukkan oleh penurunan rasio gini baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

Kinerja APBN Tahun Anggaran 2021 yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya antara lain ditunjukkan dari adanya peningkatan capaian penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta penurunan pembiayaan utang. Penerimaan negara yang meningkat merupakan dampak peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, yang sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan harga komoditas. Sedangkan dari sisi belanja, upaya efisiensi dilakukan antara lain melalui gerakan refocusing anggaran dan upaya pengendalian belanja non-prioritas oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Dengan capaian APBN yang semakin baik tersebut, maka pembiayaan utang (*debt issuance*) tahun 2021 dapat diturunkan sebesar Rp306,9 triliun dari target, yaitu sebesar Rp1.177,4 triliun yang direncanakan menjadi sebesar Rp870,5 triliun yang direalisasikan. Penurunan realisasi dari target ini merupakan langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang Pemerintah, serta untuk memberikan ruang fiskal

yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp128,2 triliun dari yang direncanakan sebelumnya, Rp15,7 triliun, menjadi Rp143,9 triliun.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dengan pengaturan penggunaannya dalam UU APBN juga berfungsi sebagai *fiscal buffer* bagi pelaksanaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah secara berkala melakukan perhitungan dan kalibrasi besaran SAL ideal dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan, estimasi realisasi belanja dan potensi kebutuhan pembiayaan. Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang di akhir tahun 2021 pada 40,7 persen PDB. Bahkan angka terbaru di bulan Juli 2022 lebih rendah menjadi 37,9 persen PDB. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan APBN yang sangat baik bahwa dalam waktu singkat, Indonesia telah mampu menurunkan kembali rasio utangnya.

Pemerintah memperhatikan dengan seksama rekomendasi DPR RI untuk melakukan perbaikan kinerja dan akurasi pelaksanaan APBN sehingga tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan dengan jumlah SiLPA dan SAL yang lebih efisien dan mendukung konsolidasi fiskal. Meskipun masih dalam kerangka penanganan pandemi, Pemerintah telah berupaya untuk membuat estimasi yang lebih presisi sehingga SiLPA tahun 2021 Rp96,6 triliun menjadi lebih rendah (turun 60,64 persen) dibandingkan SiLPA tahun 2020 yang sebesar Rp245,6 triliun. SiLPA tahun 2021 ini selanjutnya akan dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran 2022 maupun 2023 baik dalam kerangka dukungan likuiditas pemerintah (*cash management*) maupun dukungan pembiayaan (*debt management*), sehingga *cost of fund* dapat ditekan, dan APBN dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dalam APBN Tahun Anggaran 2022, Pemerintah masih berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi APBN dan reformasi struktural. Reformasi APBN bertujuan meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas untuk menjaga kesehatan masyarakat dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kita sadari bersama bahwa kerja keras belum selesai. Kini kita menyaksikan bahwa risiko yang kita hadapi telah bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat supply disruption karena pandemi dan perang, dikombinasi

dengan excessive stimulus fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju. Disusul dengan kebijakan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (*cost of fund*). Kondisi ini diikuti oleh koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Ini mengakibatkan potensi terjadinya stagflasi yaitu pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi. Hal ini merupakan kombinasi yang rumit dalam proses pengambilan kebijakan untuk pemulihan ekonomi.

Dalam kondisi sulit, seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah tetapi harus dilakukan. Namun dengan jiwa gotong-royong dan semangat kebersamaan, bahu-membahu bekerja sama maka kita yakin akan melalui masa sulit ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dan DPR terus menjaga komitmen bersama untuk terus bekerja keras memberikan yang terbaik baik rakyat, melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga pemulihan ekonomi, serta melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga APBN tetap sehat sebagai instrumen kebijakan yang efektif bagi pembangunan nasional.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,

Atas nama Pemerintah, sekali lagi, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan konstruktif serta rekomendasi kepada Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berharap agar kerja sama yang telah sangat baik selama ini dapat semakin kita tingkatkan, sehingga pengelolaan APBN di masa mendatang akan lebih baik dan menghasilkan manfaat nyata dan maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya,
Salam Kebajikan.***

Jakarta, 6 September 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati